

# Sustainability

## Report 2022

**Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
IPB University**



[pkga@apps.ipb.ac.id](mailto:pkga@apps.ipb.ac.id)



0251-8356420



[www.pkga@apps.ipb.ac.id](http://www.pkga@apps.ipb.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan anugerah dan rahmat-Nya, bisa Menyusun SDGs Repot ini. Meskipun dalam situasi covid-19 hingga saat ini tidak mengurangi kegiatan tim PKGA LPPM IPB University dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs berisi 17 tujuan yang salah satunya adalah Kesetaraan Gender yang dapat dicapai hingga tahun 2030. karena itu dalam setiap perencanaan Program dan Kegiatan IPB dan juga Pusat-pusat didalamnya berupaya mendukung pencapaian SDGs.

**SDGs Report** ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kegiatan selanjutnya serta dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan. Akhir kata, semoga segala upaya yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan Kesetaraan Gender di berbagai aspek kehidupan ini mendapat ridho Allah SWT.

Kepala

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS



[pkgga@apps.ipb.ac.id](mailto:pkgga@apps.ipb.ac.id)



0251-8356420



[www.pkgga@apps.ipb.ac.id](http://www.pkgga@apps.ipb.ac.id)

# 1 Riset Kolaborasi Indonesia – Word Class University “Pemberdayaan Perempuan dan Rekayasa Sosial Pelestarian Kerajinan Budaya Lokal Berbasis Industri Rumahan di Indonesia

Kolaborasi dengan ITB,  
UI,UGM dan UNAIR



## **2 RUMAH SAWIT: Inovasi Kelembagaan dan Teknologi Informasi untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Perkebunan Kelapa Sawit**

Isu yang terkait dengan kurangnya perhatian tentang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit tersebut, menjadi catatan Amnesty Internasional pada tahun 2016 yang mempublikasikan laporannya tentang hasil investigasinya pada pelanggaran hak asasi manusia pada perusahaan kelapa sawit. Pelanggaran tersebut berupa: penggunaan tenaga kerja anak (di bawah 15 tahun melakukan kerja fisik dan berbahaya), pemberian upah rendah di bawah upah minimum, tidak ada jaminan pensiun dan asuransi kesehatan, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan penggunaan sistem target dan sanksi yang dikaitkan dengan pembayaran, sehingga mendorong pekerja membawa anaknya untuk membantu.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan termasuk anak merupakan salah satu upaya capaian SDG's. Secara langsung tujuan nomor 5: kesetaraan gender dan nomor 8: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun dari capaian kedua tujuan tersebut, secara tidak langsung akan mencapai tujuan yang lain, karena kesetaraan gender ini sebagai pintu masuk untuk pencapaian tujuan yang lain, yaitu nomor 1: mengakhiri kemiskinan, nomor 2: mengakhiri kelaparan; nomor 3: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, dan nomor 4: menjamin pendidikan yang berkualitas. Pada kenyataannya perempuan yang memiliki kesempatan kerja yang setara dan berkeadilan, akan menggunakan penghasilan dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan bagi keluarganya, sehingga rumah tangganya berpeluang untuk lebih sejahtera. Oleh karena itu, melalui webinar ini, diharapkan mampu untuk memperoleh masukan dari multipihak dalam rangka inovasi kelembagaan dan sistem informasi untuk pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pada perkebunan sawit.



**3**

# Kajian Pelaksanaan PUG pada 5 Program Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian 2021

Program dan kegiatan pembangunan pertanian dirancang mengarah kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat petani. Hal tersebut secara tegas telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Proses Pembangunan yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2019, IPG Indonesia mengalami peningkatan dengan capaian 91,07. Capaian di tahun 2019 ini telah mampu melampaui capaian IPG di tahun 2015 yaitu 91,03 yang sempat mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2016 menjadi 90,82. Namun sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus meningkat hingga saat ini. IPG Indonesia tahun 2019 mengalami kenaikan 0,55 poin atau tumbuh 0,08 persen dibanding tahun 2018. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. IPM perempuan tumbuh 0,80 persen, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki yang tumbuh 0,70 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun capaian IPG di tahun 2019 ini telah memulihkan capaian di tahun 2015, namun belum berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama Renstra Kementerian PPPA di tahun 2019 yang menargetkan IPG telah mencapai 92,00. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan.



# Kajian Kawin Kontrak dan Perdagangan Perempuan: Analisis Jejaring Sosial dan Faktor Budaya Lokal dalam Praktek Industri Seksual di Kawasan Cianjur 2021

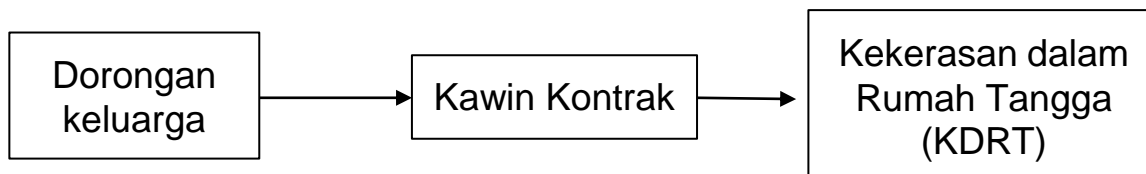
Perkara kawin kontrak tidak sesederhana dicermati sebagai praktek pelanggaran hukum yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sekaligus melanggar ketentuan yang secara spesifik tertuang dalam pasal 2 ayat 2, dimana perkawinan ini tidak dilakukan melalui pencatatan pada pejabat yang berwenang melalui pencatatan sipil dan KUA. Lebih dari itu, perkawinan kontrak menjadi masalah yang jauh lebih pelik manakala praktek ini merujuk pada praktek perdagangan orang dan mengarah pada eksploitasi seksual. Sejalan dengan itu, praktek kawin kontrak termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diatur dalam UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO.

Hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek kawin kontrak. Faktor paling utama berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan karena minimnya kapasitas dan pendidikan menjadi faktor pendorong bagi perempuan untuk terjun ke dunia prostitusi ini (Bajari, 2013); (Maripah, 2016); (Amalia, 2019); (Nawati, 2019)



Penyebab

Dampak



# 5 Sosialisasi, Advokasi, Pelatihan dan Pendampingan PUG, PPRG dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Dalam upaya akselerasi dan percepatan pembangunan yang berbasis gender, PKGA LPPM IPB University selalu melakukan Sosialisasi, Advokasi kepada kepala daerah, Lembaga maupun Kementerian guna mendukung intruksi presiden no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sebagai tindak lanjut tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu Pendampingan Pelaksanaan PUG PKGA LPPM memberikan arahan strategi dan capaian pelaksanaan PUG agar terus berjalan sustainable sehingga pembangunan lebih efektif dan efisien dalam upaya mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender disegala bidang/sector pembangunan.

Yang selanjutnya dilakukan pendampingan dan pelatihan guna dapat mengintegrasikan isu-isu gender di dalam program dan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan PUG dapat optimal dan berkesinambungan. Kedalam program dan kegiatan melalui Pelatihan PPRG yaitu disamping sebagai syarat pemenuhan 7 indikator pelaksanaan PUG juga sebagai percepatan agar semua program dan kegiatan Pembangunan menjadi responsif Gender dengan sasaran, luaran dan dampak pembangunan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat

Adapun dalam rangka terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030, PKGA LPPM IPB university selalu aktif dan bekerjasama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan sosialisasi, Advokasi, pendampingan dan Pelatihan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dengan harapan melalui Pemenuhan hak anak maka sinergitas dan sistem yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak bisa diterapkan sampai level Kelurahan dan RW.

Sejalan dengan hal tersebut PKGA LPPM IPB University berkomitmen dan bekerjasama dalam upaya mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di bogor raya, seperti Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan Program secara sustainable setiap tahun.





[pkgga@apps.ipb.ac.id](mailto:pkgga@apps.ipb.ac.id)



0251-8356420



[www.pkgga@apps.ipb.ac.id](http://www.pkgga@apps.ipb.ac.id)